



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PT REASURANSI INDONESIA UTAMA (PERSERO)
UNIT KERJA : BUSINESS MANAGEMENT DIVISION

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ADI SURYA
2. Jabatan : DIVISION HEAD
3. NHK : 891982

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.600.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 174 m2/140 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 1.600.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	90.000.000
1. MOBIL, DAIHATSU TERIOS TS EXTRA AT Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	61.700.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	1.404.243.305
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	2.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	299.221.882
Sub Total	Rp.	3.457.165.187
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.457.165.187

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PT REASURANSI INDONESIA UTAMA (PERSERO)
UNIT KERJA : CORPORATE SECRETARY DIVISION

I. DATA PRIBADI

1. Nama : AJI IRAWAN
2. Jabatan : DIVISION HEAD
3. NHK : 887215

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.500.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 108 m2/60 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	329.000.000
1. MOBIL, MERCEDES BENZ E220 Tahun 1993, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000		
2. MOTOR, YAMAHA XRIDE Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000		
3. MOBIL, TOYOTA HARRIER Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 140.000.000		
4. MOBIL, MERCEDES BENZ 280E Tahun 1984, HASIL SENDIRI Rp. 135.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	290.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	350.000.000
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	100.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.569.000.000
III. HUTANG	Rp.	68.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.501.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : **BUMN/BUMD**
LEMBAGA : **PT REASURANSI INDONESIA UTAMA (PERSERO)**
UNIT KERJA : **ACCOUNTING DIVISION**

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **DIDIK MULYANA**
2. Jabatan : **DIVISION HEAD**
3. NHK : **845901**

II. DATA HARTA

- | | | |
|---|------------|----------------------|
| A. TANAH DAN BANGUNAN | Rp. | 2.450.000.000 |
| 1. Tanah dan Bangunan Seluas 105 m2/45 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000 | | |
| 2. Tanah dan Bangunan Seluas 48 m2/20 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000 | | |
| 3. Tanah dan Bangunan Seluas 144 m2/200 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 1.200.000.000 | | |
| 4. Tanah dan Bangunan Seluas 30 m2/20 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000 | | |
| 5. Tanah dan Bangunan Seluas 30 m2/20 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000 | | |
| B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN | Rp. | 243.000.000 |
| 1. MOBIL, TOYOTA INOVA REBORN Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 225.000.000 | | |
| 2. MOTOR, YAMAHA NMAX Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000 | | |
| 3. MOTOR, HONDA HONDA BEAT Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000 | | |
| C. HARTA BERGERAK LAINNYA | Rp. | 24.500.000 |
| D. SURAT BERHARGA | Rp. | --- |
| E. KAS DAN SETARA KAS | Rp. | 2.262.060.060 |



F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	4.979.560.060
III. HUTANG	Rp.	270.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	4.709.560.060

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PT REASURANSI INDONESIA UTAMA (PERSERO)
UNIT KERJA : LEGAL, COMPLIANCE & RISK MANAGEMENT DIVISION

I. DATA PRIBADI

1. Nama : GADIS PURWANTI
2. Jabatan : DIVISION HEAD
3. NHK : 719895

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	3.230.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 189 m2/250 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG , HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 30 m2/30 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000		
3. Tanah dan Bangunan Seluas 37 m2/37 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 1.380.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	185.000.000
1. MOBIL, HONDA HRV Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 185.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	383.600.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	2.500.360.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	6.298.960.000
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	6.298.960.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PT REASURANSI INDONESIA UTAMA (PERSERO)
UNIT KERJA : FINANCE DIVISION

I. DATA PRIBADI

1. Nama : JASNOVARIA
2. Jabatan : DIVISION HEAD
3. NHK : 240622

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	2.000.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 128 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	202.500.000
1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000		
2. MOBIL, TOYOTA RUSH MINIBUS Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	68.531.038
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.271.031.038
III. HUTANG	Rp.	816.439.704
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.454.591.334

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan



Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.